

Artikel: *Akses terbuka/Open access*

**ANALISIS PENGARUH DANA DESA TERHADAP KEMISKINAN  
DI NUSA TENGGARA TIMUR**

Sitasi: Sabuna & Ruslan, 2023, JSTAR 3(1), 27-36

Kronologi naskah.

Submit : 12 Mei 2023  
Revisi : 23 Mei 2023  
Diterima : 23 Mei 2023



Penyedia Data Statistik Berkualitas  
untuk Indonesia Maju

**Reformasi Birokrasi**



# ANALISIS PENGARUH DANA DESA TERHADAP KEMISKINAN DI NUSA TENGGARA TIMUR

Demarce M Sabuna<sup>1</sup>, Kadir Ruslan<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, Indonesia

Korespondensi: [demarce@bps.go.id](mailto:demarce@bps.go.id), [kadirsst@bps.go.id](mailto:kadirsst@bps.go.id)

## Abstract

*The priority of the Village Budget usage is to finance community development and empowerment aimed at improving the welfare of rural communities, improving the quality of human life and reducing poverty. The Village Budget has been utilized in East Nusa Tenggara Province since 2015. As a region with the third highest percentage of the poor in Indonesia, the Village Budget have a negative impact on reducing poverty rate. This study aims to determine the effect of the Village Budget on reducing poverty rate in East Nusa Tenggara. This study is using variables such as the Human Development Index, the Unemployment Rate and Gross Regional Domestic Product that assumed to have effect on the poverty rate. Panel data regression analysis with random effect model concluded that the Village Budget disbursed by the government to all districts in East Nusa Tenggara have little to no effect in reducing the number of the poor in 2016-2022. The Human Development Index and Gross Regional Domestic Product variables contribute significantly to reduce poverty while the Unemployment Rate variable has not. Inefficient management of the Village Budget caused by corruption of the Village Budget, low human resources of Village Officials, lack of supervisions are acting as the main causes of why the poverty rate in East Nusa Tenggara is barely reduced.*

**Keywords:** *Village Budget, Human Development Index, GDRP, Unemployment, Poverty*

## 1. Pendahuluan

Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang masih menghadapi masalah kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Timur, pada September 2022 sebanyak 1,15 juta orang atau 20,23 persen penduduk Nusa Tenggara Timur masih hidup dibawah garis kemiskinan (BPS Provinsi NTT, 2022b).

Pengentasan kemiskinan menghadapi berbagai tantangan dengan tingginya angka kemiskinan. Wilayah kabupaten selama ini menjadi penyumbang jumlah penduduk miskin

terbesar dari total penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur. Pada Maret 2022, tingkat kemiskinan pedesaan di NTT mencapai 24,11 persen, jauh melebihi tingkat kemiskinan perkotaan di angka 9,00 persen (BPS Provinsi NTT, 2022b).

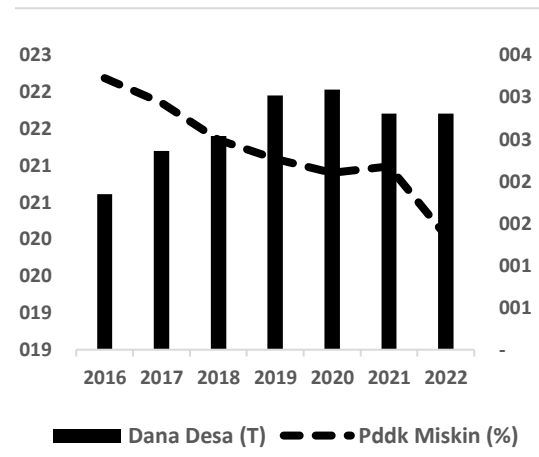
Terpusatnya perekonomian di daerah perkotaan selama beberapa dekade memang telah menimbulkan ketidakmerataan hasil pembangunan, kondisi yang telah berlangsung lama telah membawa kesenjangan pendapatan dan kesejahteraan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Dampaknya adalah presentasi penduduk miskin di daerah pedesaan

yang jauh lebih besar dibandingkan dengan perkotaan (Bukhari, 2018).

Dalam rangka meminimalisir kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan maka pemerintah berupaya melakukan berbagai kebijakan untuk pengentasan kemiskinan. Dana Desa merupakan sumber keuangan berasal dari APBN yang dianggarkan setiap tahun untuk dialokasikan kepada tiap desa. Dana desa merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan (Bukhari, 2018).

Kurun waktu tahun 2016-2022, Dana Desa yang telah dikururkan pemerintah ke Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 18,47 triliun rupiah. Pembangunan infrastruktur dasar dalam jumlah yang besar berasal dari dana desa

Investasi publik yang dilaksanakan di desa akan mendorong secara langsung terbukanya lapangan kerja baru terutama bagi masyarakat desa yang miskin dan menganggur. Sesuai regulasi, dana desa wajib dikelola dengan menggunakan prinsip swakelola. Kebutuhan tenaga kerja mayoritas akan dipenuhi dari penduduk desa setempat. Pemerintah desa diwajibkan untuk menggunakan sebanyak-banyaknya tenaga kerja setempat dengan prioritas masyarakat yang menganggur, miskin, penerima Program Keluarga Harapan (PKH), serta keluarga yang menderita kekurangan gizi. Bahan baku yang digunakan juga harus berasal dari desa setempat.



Gambar 1. Presentasi Penduduk Miskin dan Dana Desa di NTT, Tahun 2016-2022

Tren penurunan jumlah penduduk miskin dalam rentang tahun 2016 sampai dengan 2022 menarik minat penulis untuk meneliti apakah terdapat peran Dana Desa dalam mengurangi kemiskinan kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Penelitian yang dilakukan oleh (Sunu & Utama, 2019) menunjukkan bahwa dana desa berpengaruh dalam penurunan tingkat kemiskinan di Bali. (Lalira1 et al., 2018) melakukan penelitian di Kepulauan Talud menemukan bahwa Dana Desa tidak berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan di daerah tersebut. Analisis ekonomi kebijakan Dana Desa terhadap kemiskinan di Kabupaten Tulung Agung menemukan bahwa kebijakan Dana Desa berdampak pada penurunan jumlah penduduk miskin. Temuan (Dwiningwarni & Amrulloh, 2020) di Jawa Timur juga menunjukkan bahwa Dana Desa berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Sesuai dengan permasalahan di atas dan temuan sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis apakah Dana Desa memiliki pengaruh untuk mengurangi kemiskinan di wilayah kabupaten di Nusa Tenggara Timur.

Selain Dana Desa, beberapa variabel ekonomi juga memengaruhi

penurunan tingkat kemiskinan. Penelitian tentang pengaruh Dana Desa dan Indeks Pembangunan Manusia yang dilakukan di Aceh menemukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan (Tarmizi & Miksalmina, 2020). (Suliswanto, 2012) juga meneliti tentang pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia menunjukkan bahwa PDRB di masing-masing propinsi belum terlalu besar dalam mengurangi angka kemiskinan, namun lebih dominan pengurangan angka kemiskinan dari variabel IPM. Penelitian Ari Kristin Prasetyoningrum tentang Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran di Indonesia menemukan bahwa IPM berpengaruh secara langsung terhadap penurunan tingkat kemiskinan, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Kemudian, tampak pula bahwa pengangguran berpengaruh terhadap turunnya tingkat kemiskinan (Prasetyoningrum, 2018)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (BPS Provinsi NTT, 2022a). Kondisi IPM yang rendah cerminan kualitas sumber daya manusia yang rendah dan berakibat pada rendahnya produktifitas sehingga akhirnya berimplikasi pula pada hilangnya kesempatan kerja dan pendapatan.

Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja. (BPS Provinsi NTT, 2022c). Penelitian yang dilakukan oleh (Fitria, 2021) menemukan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto (BPS Provinsi NTT, 2023). Harapannya, semakin tinggi PDRB suatu daerah maka kemiskinan akan semakin berkurang atau sebaliknya. (Damanik & Sidauruk, 2020) menemukan bahwa PDRB berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan di Provinsi Sumatera utara.

Berdasarkan temuan-temuan penelitian sebelumnya, penulis menambahkan variabel ekonomi lainnya yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Produk Regional Domestik Bruto (PDRB).

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya adalah (1) variabel independen yang digunakan adalah Dana Desa, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sedangkan variabel dependen adalah jumlah penduduk miskin, (2) periode penelitian yaitu tahun 2016 - 2022, (3) Unit penelitian melibatkan seluruh kabupaten di

Provinsi Nusa Tenggara Timur, kecuali Kota Kupang.

## 2. Metode dan Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi data panel untuk mengetahui hubungan dan pengaruh dari Dana Desa sebagai variabel utama dan Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka serta Pendapatan Regional Bruto terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi NTT.

Struktur data panel terdiri dari 21 Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode 2016-2022, sehingga jumlah seluruh observasi adalah 147 observasi. Model regresi data panel yang akan digunakan merupakan model yang terpilih berdasarkan serangkaian pengujian (Septiawan, 2021).

Model regresi data panel secara umum adalah sebagai berikut:

$$y_{it} = \alpha + \beta x_{it} + u_{it} \dots\dots\dots (1)$$

dimana:

$y_{it}$  adalah nilai variabel respon untuk objek ke- $i$  dalam periode  $t$ ;  $\alpha$  adalah intersep/konstanta

$\beta$  adalah vector dengan  $N$  parameter struktural pada model;  $u_{it}$  adalah kesalahan acak total.

Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Pddkmskn_{it} = \alpha + \beta_1 DD_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 TPT_{it} + \beta_4 PDRB_{it} + u_{it} \dots\dots\dots (2)$$

Dalam rangkaantisipasi mengatasi masalah normalitas yang mungkin muncul dan kemudahan dalam analisis maka model regresi ditransformasi dengan logaritma natural sebagai berikut:

$$\ln Pddkmskn_{it} = \alpha + \beta_1 \ln DD_{it} + \beta_2 \ln IPM_{it} + \beta_3 \ln TPT_{it} + \beta_4 \ln PDRB_{it} + u_{it} \dots\dots\dots (3)$$

dimana:

adalah intersep/konstanta,

$\ln$  adalah logaritma natural,  $Pddkmskn$  adalah jumlah penduduk miskin,

$DD$  adalah Dana Desa,

$IPM$  adalah Indeks Pembangunan Manusia,

$TPT$  adalah Tingkat Pengangguran terbuka,

$PDRB$  adalah Produk Domestik Regional Bruto,

$\beta_1 \dots \beta_4$  adalah koefisien regresi variabel independen

$u_{it}$  adalah kesalahan acak total.

$i$  adalah kabupaten

$t$  adalah tahun.

Model regresi data panel yang akan digunakan merupakan model yang terpilih berdasarkan serangkaian pengujian. Pemilihan model terbaik didasarkan pada hasil uji Chow, uji Hausman, dan uji Breusch Pagan-Lagrange Multiplier (BPLM), (Septiawan, 2021)

Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik dan uji keberartian model untuk mengetahui seberapa besar model regresi data panel yang terpilih mampu menjelaskan hubungan dan pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen (Septiawan, 2021). Uji pada model random effect tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik karena diasumsikan bahwa metode estimasi Generalized Least Square (GLS) dapat mengatasi heteroskedastisitas dan autokorelasi. (Melati & Suryowati, 2018)

## 3. Pembahasan

Model regresi data panel yang digunakan adalah model terbaik yang dipilih dengan prosedur pengujian formal. Pengujian yang dilakukan adalah uji Chow, uji Hausman dan Lagrange Multipliers. (Widarjono, 2009) menyatakan bahwa Uji Lagrange Multiplier tidak digunakan apabila uji Chow dan uji Hausman menunjukkan model yang paling tepat adalah pendekatan efek tetap (*Fixed Effect*).

Dengan menerapkan pengujian tersebut didapatkan model regresi data panel terbaik yang dirangkum sebagai berikut:

Tabel 1. Rangkuman hasil pengujian untuk memilih model regresi data panel

Pengujian model terbaik	Statistik
Uji Chow	22.471610***
Uji Hausman	7.823640

Keterangan: \*\*\* signifikan 1 persen

Rangkuman pengujian memberikan informasi bahwa model *random effect* dengan pendekatan GLS merupakan model terbaik yang akan digunakan dalam menggambarkan pengaruh Dana Desa, IPM, TPT dan PDRB terhadap kemiskinan. Uji normalitas tidak wajib pada pendekatan OLS, sementara wajib untuk pendekatan GLS. (Mudrajad Kuncoro, 2003)

Tabel 2. Rangkuman hasil pengujian normalitas dan non multikolinearitas

	Pengujian	Stat uji
Normalitas	Uji Jargue-Bera	4.94868
	ln_DD vs ln_IPM	0.36059
non multikolinearitas	ln_DD vs ln_TPT	0.14981
	ln_DD vs ln_PDRB	0.08211
	ln_IPM vs ln_TPT	0.21131
	ln_TPT vs ln_PDRB	0.52594
	ln_IPM vs PDRB	0.36721

Rangkuman pengujian menunjukkan bahwa residual mengikuti distribusi normal dan asumsi non multikolinieritas telah terpenuhi. Selanjutnya pengujian keberartian model untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara jumlah penduduk miskin dengan Dana Desa, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pendapatan Domestik Regional Bruto.

Tabel 3. Rangkuman hasil pengujian keberartian model

	Pengujian		Statistik uji
	Parsial	t-test	
C		15.52517	5.927743***
Ln_DanaDesa		0.843665	13.35600***
Ln_IPM		-3.751694	-4.482695***
Ln_TPT		-0.042126	-0.991974
Ln_PDRB		-0.433304	-3.170057***
KoefDeterminasi	R-squared		0,603867
	Adj.R-Squared		0,592629
Simultan		F-Test	54,73524***

Keterangan: \*\*\* signifikan 1 persen

Pengujian keberartian model menunjukkan bahwa variasi dari jumlah penduduk miskin yang dapat dijelaskan melalui variabel Dana Desa, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka dan PDRB adalah 59.26 persen. Sisanya 40,74 persen dipengaruhi oleh faktor lain.

Pengujian simultan menunjukkan bahwa kemiskinan dapat dipengaruhi secara bersama-sama oleh Dana Desa, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka dan PDRB. Secara parsial, dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Desa, IPM, dan PDRB memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan variabel tingkat pengangguran terbuka tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Hubungan dari masing-masing variabel independen terhadap jumlah penduduk miskin ditunjukkan melalui nilai koefisien regresi yang dihasilkan. Berdasarkan nilai koefisien regresi, maka Dana Desa memiliki pengaruh positif artinya semakin bertambah Dana Desa akan meningkatkan jumlah penduduk miskin. IPM, TPT dan PDRB memiliki pengaruh negatif yang berarti bahwa peningkatan ketiga variabel tersebut akan mengurangi jumlah penduduk miskin di Provinsi NTT.

Secara empiris, Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Timur.

Koefisien regresi dari variabel Dana Desa yang cukup besar mengindikasikan bahwa Dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah untuk pembangunan di kabupaten tidak cukup efektif untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Hal ini sejalan dengan temuan Tarmizi dan Miksalmina di Aceh pada 2020 yang mengatakan bahwa Dana Desa berpengaruh terhadap peningkatan tingkat kemiskinan (Tarmizi & Miksalmina, 2020). Kondisi yang sama juga ditemukan oleh Yanuar, dkk di Sulawesi Tengah (Yanuar et al., 2021), Rimawan dan Aryani di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat menemukan bahwa Dana Desa tidak berhasil menurunkan tingkat kemiskinan di daerah tersebut (Rimawan & Aryani, 2019).

Program prioritas dalam penggunaan Dana Desa adalah pembangunan infrastruktur desa (2016), pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), menentukan Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades), pembangunan embung desa, dan pembangunan sarana olahraga (2017-2019). Selama tahun 2020-2022, fokus program diarahkan untuk penanganan wabah corona virus (covid) 19.

Program-program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat pedesaan dan penanganan wabah covid 19. Kebijakan Dana Desa harus dipandang sebagai kebijakan strategis untuk pembangunan pedesaan. Dana Desa dapat didayagunakan untuk membiayai pengelolaan sumberdaya tersebut menjadi kegiatan usaha produktif dan menghasilkan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dana Desa memiliki implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan desa di setiap kabupaten yang ada di Indonesia (Rahayu, 2018). Tetapi, pada sisi yang lain, kebijakan ini mengandung

ancaman yang besar apabila tidak dilakukan pengawasan secara maksimal. Potensi praktik penyalahgunaan kekuasaan cenderung digunakan untuk korupsi di desa. Pada tahun 2016, sebanyak 32 Kepala Desa dalam pusaran korupsi Dana Desa (Subbagian Hukum - BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2019). Data kasus korupsi dana desa terus bertambah dari waktu ke waktu.

Kelemahan lain yang terjadi dalam pengelolaan dana desa adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Kurangnya transparansi anggaran Dana Desa membuat masyarakat sulit untuk mengawasi pengelolaan Dana Desa. Hal ini memberikan ruang kepada Pemerintah Desa untuk melakukan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Sejalan dengan temuan Maximilianus Taek bahwa masalah dalam pengelolaan Dana Desa adalah masalah sumber daya manusia Pemerintah Desa yang masih terbatas. Sebagian besar Kepala Desa merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan hanya sedikit lulusan Sarjana namun bukan di bidang pemerintahan (Taek et al., 2020)

Penggunaan Dana Desa masih belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (Veronica et al., 2020), Kinerja Aparatur Desa dalam pengelolaan Dana Desa belum maksimal. Kurangnya produktifitas, kualitas pelayanan, dan responsibilitas kegiatan yang dihasilkan karena kurangnya kompetensi dan keahlian aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa. Ketersediaan sumber daya manusia yang terbatas, sumber daya finansial yang terbatas serta infrastruktur dan perlengkapan yang terbatas (Saputra et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa belum optimalnya pengelolaan Dana Desa sehingga tidak berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan.

Saran perbaikan yang disampaikan oleh Darius Beda Daton, Kepala Perwakilan Ombudsman NTT (Daton, 2019) terkait pengawasan Dana Desa antara lain: pertama; optimalisasi pengawasan internal oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. kedua; pendampingan oleh bagian organisasi Sekertaris Daerah (Sekda) terhadap pemerintah desa dalam bentuk fasilitasi penyusunan standar pelayanan publik. ketiga; memfasilitasi pemerintah desa agar membentuk Unit Pengaduan Pelayanan Publik (UP3) Desa. Diharapkan warga desa boleh menyampaikan komplain terkait penyelenggaraan pemerintahan desa melalui unit tersebut agar segera ditangani pemerintah desa. keempat; optimalisasi pendampingan terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa. kelima; optimalisasi penguatan kapasitas pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan oleh aparatur desa. Harapannya Dana Desa dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Peningkatan indeks pembangunan manusia ternyata berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin pada wilayah kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Kondisi IPM yang meningkat merupakan cerminan kualitas sumber daya manusia yang baik dan berdampak pada meningkatnya produktifitas. Implikasinya adalah meningkatnya pendapatan untuk standar hidup layak. Peningkatan pengetahuan dan standar

hidup sehat juga akan berdampak pada peningkatan IPM. Perbaikan komponen komponen IPM yaitu standar hidup layak, pengetahuan dan perbaikan kesehatan akan mengurangi jumlah penduduk miskin di daerah kabupaten.

Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh tidak signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Hasil tersebut menunjukkan bahwa belum cukup bukti empiris untuk menyatakan bahwa penurunan tingkat pengangguran terbuka mengurangi jumlah penduduk miskin. Sektor pertanian menyerap sekitar 50 persen angkatan kerja dengan jumlah jam kerja yang relatif tinggi tetapi produktifitas masih rendah sehingga tidak mampu meningkatkan pendapatan. Kondisi ini dibuktikan dengan Nilai Tukar Petani (NTP) NTT di bawah 100 (perubahan indeks yang diterima petani lebih lambat dari perubahan indeks yang dibayar oleh petani untuk konsumsi rumahtangga dan biaya produksi di sektor pertanian).

PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Hal ini menunjukkan bahwa jika pendapatan masyarakat semakin meningkat maka dapat mengurangi jumlah penduduk miskin. Penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan produktifitas sektor pertanian dan hilirisasi produk pertanian dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga pada akhirnya akan mengurangi jumlah penduduk miskin.

#### 4. Kesimpulan

Dana Desa yang telah dikucurkan oleh Pemerintah ke Nusa Tenggara Timur belum efektif menurunkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2016-2022. Strategi yang perlu dipertimbangkan adalah pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan seperti peningkatan akses

permodalan, peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran, pengembangan keterampilan dan layanan usaha, serta pengembangan kewirausahaan, kemitraan, dan keperantaraan.

Kinerja aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa kurang maksimal, produktifitas, kualitas pelayanan, dan responsibilitas rendah karena kurangnya kompetensi dan keahlian aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa. Ketersediaan sumber daya manusia yang terbatas, sumber daya finansial yang terbatas serta infrastruktur dan perlengkapan yang terbatas serta penyelewengan Dana Desa ditengarai menjadi penyebab belum optimalnya Dana Desa untuk penurunan tingkat kemiskinan.

Pembangunan diharapkan berlandaskan pada keunggulan kompetitif di berbagai wilayah dengan di dukung oleh SDM (termasuk aparat desa) yang berkualitas dan berdaya saing. Diperlukan pendampingan dan pengawasan yang lebih optimal dalam pengelolaan Dana Desa oleh Institusi terkait sehingga dapat tercapai tujuan pemerataan pembangunan dengan memanfaatkan kearifan lokal untuk percepatan penurunan kemiskinan dan pemulihan ekonomi nasional.

Penelitian ini memiliki keterbatasan terutama penggunaan variabel independen lainnya di tingkat kabupaten karena pengaruh variabel independen secara simultan hanya mencapai 60 persen. Saran untuk penelitian selanjutnya agar dilakukan di tingkat terkecil dengan mencari proxy tepat yang dapat mewakili tingkat kemiskinan kabupaten, termasuk variabel jumlah penduduk. Penelitian ini juga belum mengontrol bantuan sosial dari pemerintah karena keterbatasan terkait ketersediaan datanya. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya agar mempertimbangkan efek bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan.

## Daftar Pustaka

- BPS Provinsi NTT. (2022a). *(Metode Baru) Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota 2010-2022*.
- BPS Provinsi NTT. (2022b). *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten Kota Tahun 2002-2022*.
- BPS Provinsi NTT. (2022c). *Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota 2004-2022*.
- BPS Provinsi NTT. (2023). *Produk Domestik Regional Bruto menurut Kabupaten/Kota.2015-2022*.
- Bukhari, E. (2018). Kebijakan Dana Desa Dalam Usaha Pengentasan Kemiskinan Penduduk Pedesaan. *Jurnal Administrasi Kantor*, 6(2), 123–132. <http://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JAKBI/article/view/1014/848>
- Damanik, R. K., & Sidauruk, S. A. (2020). Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pdrb Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Darma Agung*, 28(3), 358. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i3.800>
- Daton, D. B. (2019). Mengawasi Dana Desa. *Mengawasi Dana Desa*.
- Dwiningwarni, S. S., & Amrulloh, A. Z. (2020). Peranan Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jombang Jawa Timur. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 4(1), 1–20. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i1.4128>
- Fitria, at all. (2021). *Pengaruh Dana Desa, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Periode 2015-2019*.
- Lalira<sup>1</sup>, D., Nakoko<sup>2</sup>, A. T., & Rorong<sup>3</sup>, I. P. F. (2018). Pengaruh Dana

- Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(4), 62–72.
- Melati, P. M., & Suryowati, K. (2018). Aplikasi Metode Common Effect, Fixed Effect, Dan Random Effect Untuk Menganalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Statistika Industri Dan Komputasi*, 3(1), 41–51. <http://ipm.bps.go.id/>
- Mudrajad Kuncoro. (2003). *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*.
- Prasetyoningrum, A. K. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 217. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v6i2.3663>
- Rahayu, D. (2018). Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. *Economics Development Analysis Journal*, 6(2), 107–116. <https://doi.org/10.15294/edaj.v6i2.22207>
- Rimawan, M., & Aryani, F. (2019). Pengaruh alokasi dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia serta kemiskinan di Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(3), 287–295. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/22539>
- Saputra, D., Hamdi, M., & Rowa, H. (2022). Kinerja Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Renah Sungai Besar Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *Journal of ...*, 1(1), 16–29. <https://journal.rc-communication.com/index.php/JOGS/article/view/45%0Ahttps://journal.rc-communication.com/index.php/JOGS/article/download/45/46>
- Septiawan, A. (2021). Penerapan Model Regresi Data Panel dalam Menganalisis Determinan Capaian Pendidikan Perempuan di Indonesia Tahun. *PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika*, 4, 694–704. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/prisma/>
- Subbagian Hukum - BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2019). 32 kades di NTT dalam pusaran korupsi dana desa dan alokasi dana desa. *Ntt.Bpk.Go.Id*, 6–9.
- Suliswanto, M. (2012). Pengaruh produk domestik bruto dan indeks pembangunan manusia. *Ub Malang*, 3, 3.
- Sunu, M. K. K., & Utama, M. S. (2019). Pengaruh Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 8, 843–872.
- Taek, M. M., Wasistiono, S., & Meltarini, M. (2020). Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 83–102. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v5i2.1324>
- Tarmizi, H., & Miksalmina. (2020). Pengaruh Dana Desa dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh.

- Jurnal Ilmu Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsyiah*, 5(4), 201–211.
- Veronica, D., Winarni, E., & Soleh, A. (2020). Evaluasi Keberhasilan Penggunaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Maju Jaya Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo). *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 5(2), 318.  
<https://doi.org/10.33087/jmas.v5i2.202>
- Widarjono, A. (2009). *Ekonomika Pengantar dan Aplikasinya*.
- Yanuar, A., Anwar, C., & Jokolelono, E. (2021). Analisis Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sulawesi Tengah 2015 – 2019. *Katalogis*, 9(3), 283–295.  
<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/18156>